



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391  
Vol. 2 No. 2 Desember 2020

## Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



### ***Dynamic Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar**

Yuni Kartika Fajri<sup>1</sup>, Nur Khaerah<sup>2</sup>, Fitriani Sari Handayani Razak<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

---

#### Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: **30-05-2020**

Disetujui: **21-12-2020**

Dipublikasikan : **22-12-2020**

---

Kata Kunci :

*Governance;*

*Management; Green*

*open Space*

---

Tujuan Penelitian ini untuk memahami proses *Dynamic Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar. Lokasi penelitian ini bertempat di jalan Sultan Hasanuddin, kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *Dynamic Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota makassar belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau Publik sehingga masih kesulitan dalam memenuhi target RTH di kota Makassar.

---

**DYNAMIC GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT OF GREEN OPEN SPACE  
IN MAKASSAR CITY**

---

*Abstract*

*The purpose of this study is to understand the process of dynamic governance in managing green open spaces in Makassar City. The location of this research is located on Jalan Sultan Hasanuddin, Ujung Pandang sub-district, Makassar City. The type of research used is descriptive qualitative and the type of research used is the phenomenological type. The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. The technique of collecting data using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is to compare the opinions of one informant with another by asking the same questions. The results of the research conducted indicate that the dynamic governance in managing green open spaces in the city of Makassar has not been effective. This occurs due to the lack of land to be used as Public Green Open Space, so that it is still difficult to meet the green open space target in Makassar city.*

---

2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik\_Ummat

\*Alamat Korespondensi:

<sup>1</sup> [ykartikaf@mail.com](mailto:ykartikaf@mail.com)

<sup>2</sup> [Nurkhaerah@unismuh.ac.id](mailto:Nurkhaerah@unismuh.ac.id)

<sup>3</sup> [Fitriani@unismuh.ac.id](mailto:Fitriani@unismuh.ac.id)

## PENDAHULUAN

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut merubah pola pelayanan diri birokratis eletis menjadi birokratis populis (Usman, 2011). Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada (Harta & Diana, 2017). Penerapan good governance pada akhirnya memberi syarat mengenai perlunya keterlibatan organisasi masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang Negara (Prianto, 2011). Akademisi seringkali mendiskusikan dan mengkonseptualisasikan tiga kemampuan suatu pemerintahan yaitu: *think ahead, think again dan think across* (Neo & Chen, 2007).

Adapun sarana dan prasarana yang dibangun dalam meningkatkan kenyamanan masyarakat yaitu ruang terbuka hijau, berupa pembangunan hutan kota yang berfungsi sebagai tempat rekreasi dan dapat melaksanakan kegiatan berbentuk rekreasi aktif seperti lapangan olahraga, dan rekreasi pasif seperti taman (Melati, 2020). Ruang Terbuka Hijau sebenarnya salah satu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan dan merupakan salah satu elemen kota dan kehadirannya dalam suatu kota didasarkan pada ketentuan dan standar-standar tertentu (Melati, 2020). Upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan menjadi kebutuhan dan akibat terbatasnya sumber daya lahan maka akan terjadi konversi lahan hijau untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Penelitian-penelitian serupa yang membahas tentang Ruang Terbuka Hijau antara lain pernah dibahas oleh Rijal (2008), Tahir & Nahrudin (2017), dan Amin & Amri (2011). Rijal (2008) menitikberatkan pada Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Ekologis yang berdasarkan pada kemampuan tanaman dalam menyerap CO<sub>2</sub>. Setiap luasan 1 ha mempunyai kemampuan dalam menyerap CO<sub>2</sub> yang dihasilkan oleh manusia sebanyak 2000 orang atau dengan kata lain bahwa setiap orang memerlukan 5 m<sup>2</sup> ruang terbuka hijau (Rijal, 2008). Sedangkan Tahir & Nahrudin (2017) menitikberatkan pada kapabilitas *Dynamic Governance* dalam optimalisasi pengelolaan lahan terbuka hijau di kota Makassar hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang-ruang terbangun dengan cara melakukan penanaman pada atap dan tembok bangunan selain itu strategi dari segi kebijakan dapat ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait dengan RTH (Tahir & Nahrudin, 2017). Berbeda dengan Amin & Amri (2011) yang memusatkan perhatian pada Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di kompleks perumahan bumi permata sudiang kota Makassar hasil penelitian menunjukkan

bahwa Masih dibutuhkan upaya-upaya sistematis dari pengembang bersama-sama dengan penghuni kompleks perumahan untuk menambah prosentase jumlah Ruang Terbuka Hijau sehingga kebutuhan penghuni akan lingkungan yang ekologis dapat terpenuhi (Amin & Amri, 2011).

Dari beberapa hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa masing-masing penelitian memiliki permasalahan tersendiri terkait *Dynamic Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar. Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sisi lain dari pengembangan *Dynamic Governance* dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Makassar.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif tentang *Dynamic Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar adalah Metode Penelitian Kualitatif. Metode dipaparkan secara ringkas namun efektif menjelaskan cara, teknik dan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan. Dengan maksud peneliti dapat mengumpulkan data yang mendalam langsung dari lokasi penelitian mengenai *Dynamic Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar. Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder dengan melakukan observasi dan wawancara pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat terkait mengenai Ruang Terbuka Hijau di Makassar.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menilai kemampuan pemerintahan, Neo & Chen mendiskusikan dan mengkonseptualisasikan tiga kemampuan suatu pemerintahan yaitu: *think ahead, think again dan think across* (Neo & Chen, 2007). Berfikir ke depan (*thinking ahead*), berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah yaitu dalam bentuk sosialisasi terhadap pencemaran lingkungan yang mengedepankan pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup membutuhkan perpaduan dengan seluruh *stakeholder* dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mengelola lingkungan. Salah satu bentuk pencemaran lingkungan adalah yang diakibatkan oleh limbah (Bahan berbahaya dan beracun) (Ginanjari & Mubarrok, 2020).

Apabila melihat kebijakan pada Lahan Terbuka Hijau dengan menelisik pada kebijakan Kepmendagri No. 01/2007, tentang penyediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau wilayah kota

(RTHKP). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan pemanfaatan lahan terbuka hijau wilayah kota (RTHKP) mengharuskan setiap kota memiliki lahan terbuka hijau seperti taman perkotaan dan hutan kota minimal 30 persen. Namun hal ini belum dapat terpenuhi oleh kota manapun di Indonesia termasuk Makassar. Selain itu implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan bentuk antisipasi pemerintah dengan tujuan merumuskan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yang menjadi acuan dalam berbagai kebijakan dan kegiatan pengelolaan ruang terutama pengelolaan ruang terbuka termasuk ruang publik di Kota Makassar (Zulkarnaen G, Harakan, & Hawing, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh karena masih terbendung oleh arus urbanisasi perkembangan perkotaan seperti pembangunan perumahan dan ruko-ruko belum lagi konvensi wilayah resapan air banyak terjadi yang disebabkan oleh sejumlah pembangunan. Selain itu pemenuhan RTH sejumlah 30 Persen yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 masih belum dapat terpenuhi. Selain itu dapat diketahui bahwa opsi strategi yang dapat dimunculkan yaitu pemanfaatan ruang-ruang terbangun dengan cara melakukan penanaman pada atap dan tembok bangunan selain itu strategi dari segi kebijakan itupun penghasilannya sungguh jauh berbeda dari pendapatan yang ditempat sebelumnya. dapat ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait dengan RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum melalui peran DPRD.

Dalam konseptualisasi Berpikir Lagi (Thinking Again) Berdasarkan data di lapangan dapat diketahui bahwa hasil tinjauan yang dilakukan pemerintah kota masih kesulitan dalam memenuhi target RTH dimana kota Makassar masih dibawah 10 % dari 30 % persyaratan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Peninjauan dilakukan dengan memaksimal pendataan dan mengupdate kembali ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar yang menggunakan teknologi dari satelit selain itu juga mendapat klarifikasi langsung dari kelurahan mengenai area lingkungan terbuka hijau yang ada di Kota Makassar.

Penelitian pada kasus serupa dapat diketahui bahwa mendesain ulang kebijakan dan program RTH dapat dilakukan pemerintah secara sinergis dengan tidak terlepas dari strategi pengelolaan lingkungan hidup terpadu lainnya yang difokuskan pada empat aspek pengelolaan, yaitu permasalahan sampah, RTH, kualitas air, dan fasilitas umum lain yang terkait erat. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa system baru yang dapat dilakukan di Kota

Makassar dengan mengadakan strategi *vertical garden* yang dapat meningkatkan fungsi RTH namun tidak menambah luasan RTH namun strategi baru yang perlu di optimalkan adalah menyediakan lahan terbuka hijau pada lahan masyarakat yakni sejumlah 10 %. Selain mendukung sistem Vertikal tersebut juga perlu difollow up dengan peneningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan lahan terbuka hijau. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa system vertical dalam optimalisasi lahan terbuka hijau perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dengan mengkontribusikan sebanyak 10% lahan mereka untuk lahan terbuka hijau disamping itu dorongan berupa pemerdayaan komunitas hijau sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam optimalisasi lahan terbuka perlu diperkuat oleh pemerintah kota.

Konsep Berpikir lintas batas (*thinking across*) yang selaras dengan fakta di lapangan, dapat diketahui bahwa indikator adopsi dapat dilakukan dengan mengikuti pola yang digambarkan oleh Negara lain seperti di Amerika dan Jepang dimana RTH dibangun melalui ijin sebagai bagian karya pembangunan dalam artian ada aturan pembatasan perencanaan kota, istilahnya sub-division control yakni Metode menyisihkan lahan untuk RTH didasarkan pada kriteria dengan skala dan tipe karya pembangunan tertentu sesuai yang dikehendaki, sekaligus merupakan kondisi penting agar usulan pembangunan disetujui hal ini berlaku di Amerika dan di Jepang juga sangat mempertimbangkan struktur bangunan di dalamnya yang memerlukan proyeksi sebuah area kosong dan terbuka untuk umum merupakan contoh yang patut untuk ditiru atau di adopsi.

Penelitian ini menunjukkan ketiga komponen atau variabel Kapabilitas *Dynamic Governance* Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar yaitu berfikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir lagi (*thinking again*), dan berpikir lintas batas (*thinking across*) diperoleh gambaran bahwa kemampuan mengantisipasi merupakan bagian dari komponen:

1. Berfikir ke depan (*Thinking ahead*) terlihat dari kebijakan pemanfaatan lahan terbuka hijau wilayah kota (RTHKP) mengharuskan setiap kota memiliki lahan terbuka hijau seperti taman perkotaan dan hutan kota minimal 30 persen namun hal ini belum dapat terpenuhi di Kota Makassar selain itu indikator pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh karena masih terbeleng oleh arus urbanisasi perkembangan perkotaan seperti pembangunan perumahan dan ruko-ruko selain itu opsi startegi yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan ruang-ruang terbangun dengan cara melakukan penanaman pada atap dan tembok bangunan selain itu strategi dari segi kebijakan dapat ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait

dengan RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum melalui peran DPRD.

2. Pada variabel berpikir lagi (*thinking again*) memberikan gambaran bahwa adanya hasil tinjauan yang dilakukan pemerintah kota masih kesulitan dalam memenuhi target RTH dimana kota Makassar masih dibawah 10 % dari 30 % persyaratan yang ada dalam UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Peninjauan dilakukan dengan memaksimalkan pendataan dan mengupdate kembali ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar yang menggunakan teknologi dari satelit selain itu juga mendapat klarifikasi langsung dari kelurahan mengenai area lingkungan terbuka hijau yang ada di Kota Makassar. Kemudian indikator mendesain ulang kebijakan dan program RTH dapat dilakukan pemerintah secara sinergis dengan tidak terlepas dari strategi pengelolaan lingkungan hidup terpadu lainnya yang difokuskan pada empat aspek pengelolaan, yaitu permasalahan sampah, RTH, kualitas air, dan fasilitas umum lain yang terkait erat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2005-2015, persentase luas Ruang Terbuka Hijau ditargetkan 5% dari kawasan pusat kota. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang public diharapkan dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya arsitektural ekonomi yang meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir mengurangi polusi udara dan menurunkan temperature kota dan menjadikan keteduhan pada Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang public.

3. Berpikir lintas batas (*thinking across*) diperoleh gambaran yaitu indikator adopsi dapat dilakukan dengan mengikuti pola yang digambarkan oleh Negara lain seperti di Amerika dan Jepang dimana RTH dibangun melalui ijin sebagai bagian karya pembangunan dalam artian ada aturan pembatasan perencanaan kota, istilahnya subdivision control yakni Metode menyisihkan lahan untuk RTH didasarkan pada kriteria dengan skala dan tipe karya pembangunan tertentu sesuai yang dikehendaki, sekaligus merupakan kondisi penting agar usulan pembangunan disetujui hal ini berlaku di Amerika dan di Jepang juga sangat mempertimbangkan struktur bangunan di dalamnya yang memerlukan proyeksi sebuah area kosong dan terbuka untuk umum merupakan contoh yang patut untuk ditiru atau di adopsi. Selanjutnya indikator evaluasi yang perlu diperkuat adalah komitmen bersama untuk menambah luas lahan agar mencapai 30 % luas lahan terbuka hijau kota selain itu perlunya peningkatan peran pemerintah, swasta dan masyarakat yang sinergis untuk mengoptimal Lahan Terbuka Hijau Kota Makassar. Hal sesuai dengan konsep governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas

kepentingan-kepentingan tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian *Dynamic Governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Makassar, mengungkapkan bahwa dengan penerapan *Dynamic Governance* maka adanya antisipasi RTH melalui kebijakan, pemahaman pencapaian tujuan belum dapat dikatakan dapat dipahami secara menyeluruh namun opsi strategi yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan ruang-ruang terbangun dengan cara melakukan penanaman penanaman pohon kembali selain itu strategi dari segi kebijakan dapat ditempuh dengan mendorong penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah terkait dengan RTH. Selanjutnya peninjauan kebijakan dapat dilakukan dengan memaksimal pendataan dan mengupdate kembali ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar selain itu desain kebijakan tidak terlepas dari strategi pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu termasuk didalamnya *vertical system* yang perlu didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta sinergitas antara pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, S., & Amri, N. (2011). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kompleks Perumahan Bumi Permata Sudiang Kota Makassar. In *Prosiding Hasil Penelitian Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin* (pp. 1–2). Makassar: Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- Ginanjari, W. R., & Mubarrok, A. Z. (2020). Civil Society and Global Governance: The Indirect Participation of Extinction Rebellion in Global Governance on Climate Change. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i1.8>
- Harta, R., & Diana, B. A. (2017). Etos Kerja Profesionalisme Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 103. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13549>
- Melati, H. B. (2020). Regulation Implementation Effectiveness of Outdoors Users in Town Square of Bandung, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(2), 108–121. <https://doi.org/10.46507/jcgpp.v1i2.7>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Changes in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.11>
- Rijal, S. (2008). KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 3(1).



Tahir, M. M., & Nahrudin, Z. (2017). KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR. *CosmoGov*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12404>

Usman, J. (2011). Manajemen Birokrasi Profesional Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.24>

Zulkarnaen G, E., Harakan, A., & Hawing, H. (2016). Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 5(1).